

KINERJA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Performance of Regional Revenue Management Field of Regional Financial Agency of Kalimantan Selatan Province

Ade Hermawan^{1*}
Muhammad Jamili²
Bakhtiar³

¹STIA Bina Banua Banjarmasin

*corresponding author:
stiabb08@gmail.com

Abstrak

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki akuntabilitas yang baik, mampu memenuhi kewajiban keuangan dengan baik, memiliki kejujuran yang baik, menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dengan baik, serta kegiatan pengendalian pun terlaksana dengan baik pula. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan semuanya mengarah pada kinerja yang baik.

Kata Kunci:

Kinerja
Pendapatan daerah
Keuangan
Kalimantan Selatan

Keywords:

Performance
Regional income
Finance
Kalimantan Selatan

Abstract

The Regional Revenue Management Sector of the Regional Financial Agency of South Kalimantan Province has good accountability, is able to fulfill financial obligations well, has good honesty, applies the principles of efficiency and effectiveness well, and control activities are carried out well too. So overall it can be concluded that the performance of the Regional Revenue Management Sector of the Regional Financial Agency of South Kalimantan Province all leads to good performance.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment/index>

Submit: 04-11-2024

Accepted: 15-11-2024

Published: 25-11-2024

PENDAHULUAN

Badan Keuangan Daerah adalah salah satu instansi pemerintah yang berada di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan yang mengkoordinasikan dan mengendalikan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah. Dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan khususnya di bidang Pendapatan Daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas, Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi : perumusan kebijakan teknis

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; koordinasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; koordinasi pengelolaan kas daerah; koordinasi pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluarankas daerah; koordinasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; koordinasi pengembangan pendapatan pajak retribusi dan lainnya; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPTD; dan Pengelolaan kesekretariatan.

Fenomena yang terjadi mengenai permasalahan pada Badan Keuangan Daerah adalah : Dalam kegiatan pelaksanaan kinerja belum optimal disebabkan karena anggaran Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan dan Kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan karena para aparatur

masih membutuhkan masukan-masukan seperti lokakarya, seminar, dan lain-lain.

Pengelolaan PAD merupakan tanggung jawab aparatur pemerintah daerah khususnya Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Semua proses pengelolaan PAD tentunya sangat dipengaruhi oleh kinerja dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga terjadinya penurunan ataupun kenaikan PAD suatu daerah sedikit banyak dipengaruhi oleh kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan latar belakang di atas membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti, Kinerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

METODE PENELITIAN

Metoda yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metoda Deskriptif, yaitu suatu metoda penelitian yang bertujuan guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan suatu program/ kegiatan. Artinya penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara faktual kinerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil pendapat dari informan (staff Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan) dan key informan (Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan) mengenai kinerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dan data dari hasil kuisoner dari perwakilan UPPD kabupaten dan kota sekalimantan Selatan mengenai kinerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Data sekunder ialah data pendukung yang diperlukan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang terdiri dari : Profil Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Keuangan Daerah.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Dokumentasi, Yaitu data dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Wawancara, Yaitu data dikumpulkan dengan melakukan interview dengan key informan penelitian untuk dijawab yaitu seputar kinerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kuisisioner, Yaitu data dikumpulkan dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada informan terpilih untuk mendapatkan data mengenai kinerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Peneliti menggunakan analisa kualitatif yaitu mempelajari, menelaah dan menganalisa data, informasi dan fakta yang penulis peroleh kemudian data tersebut dibaca, dianalisa dan diinterpretasikan untuk akhirnya diambil suatu kesimpulan.

HASIL

Pada awalnya Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terbagi menjadi 3 bagian komponen organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Selatan, Biro Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga Bagian Aset pada Biro Perlengkapan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan khusus untuk Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sebelu dibentuk Lembaga Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan, pengelolaan urusan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditangani oleh Bagian Pajak dan Pendapatan Asli Daerah Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan

Selatan. Kemudian tahun 1975, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 1975, tanggal 29 Maret 1975 ditetapkan Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

Pada perkembangan selanjutnya, dalam menyempurnakan dan penyeragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah se-Indonesia, Menteri Dalam Negeri mengatur dan memberikan petunjuk melalui Surat Keputusan Nomor KUPD 7 / 7 / 39-26 tanggal 11 Maret 1978 Jo.

Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/ 8 / 38 tanggal 11 April 1978. Mepedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas maka Pemerintah Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Selatan menyusun dan menerbitkan Peraturan Daerah Tingkat Satu Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, yang isinya mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah hingga Cabang-Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Daerah Tingkat II. Peraturan Daerah ini tidak mengalami perubahan hingga tahun 2000.

Otonomi Daerah yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, juga Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pendapatan, yakni dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan tentang Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD). Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

yang dilaksanakan saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100). Dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga sesuai dengan adanya Perda terkait struktur organisasi yang baru di atas, maka sejak Januari 2017 terbentuklah Organisasi Perangkat Daerah yang baru yang bernama Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Visi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah "Tersedianya informasi keuangan Daerah yang akuntabel dan terpadu di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah dan Good Governance".

Misi Untuk dapat mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan Misi sebagai pemandu terhadap tindakan manajemen dimasa yang akan datang sehingga dapat terus eksis mengikuti perubahan serta dapat mengkoordinasikan segala tindakan dan usaha untuk mencapai visi Organisasi. Untuk itu Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Misi sebagai berikut: Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Organisasi, Meningkatkan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi secara efektif dan efisien, Mewujudkan ketersediaan Data / Informasi Keuangan secara cepat, reliable dan akurat serta keterpaduan Sistem Informasi Keuangan antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah, Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah dan Menyusun dan menerapkan perangkat peraturan yang mendukung Penatausahaan Keuangan Daerah.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan kebijakan sebagai berikut. Tujuan : Peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat dalam proses pengelolaan pendapatan daerah, Tersedianya teknologi dan aparatur pengelolaan pendapatan daerah, Peningkatan sinergisitas pengelolaan kekayaan daerah. Sasaran : Sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah Meningkatnya pendanaan daerah.

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan fungsi penunjang Urusan Pemerintah bidang pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pasal 23 ayat (1), Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Koordinasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Koordinasi pengelolaan kas daerah, Koordinasi pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah, Koordinasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, Koordinasi pengembangan pendapatan pajak retribusi dan lainnya dan Pengelolaan kesekretariatan.

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari : Kepala Badan Keuangan Daerah, Sekretariat, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Pembedaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian & Evaluasi Pendapatan Daerah, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pada suatu organisasi, unsur manusia sangat menentukan sekali karena berjalan tidaknya suatu organisasi kearah pencapaian tujuan yang di tentukan tergantung kepada kemampuan manusia untuk menggerakkan organisasi tersebut ke arah yang telah di tetapkan, begitu juga pada Badan Keuangan Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan. Manusia yang terlibat dalam organisasi ini di sebut juga pegawai.

Pegawai merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa di butuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi).

Jumlah pegawai pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah 19 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdapat 3 pegawai yang berpendidikan Strata dua (S2), 7 orang berpendidikan SI, 1 orang berpendidikan diploma, dan ada 8 orang yang berpendidikan SLTA. Berdasarkan pangkat dan golongan, pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat 7 orang yang memiliki golongan III/d, 1 orang memiliki golongan III/c, 1 orang III/b, 1 orang III/a, 1 orang II/d, 2 orang II/c, dan 1 orang memiliki golongan II/a.

Dalam penelitian ini kinerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, diukur dengan menggunakan indikator, yaitu akuntabilitas, Kemampuan memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, efisiensi dan efektivitas, dan pengendalian yang dihubungkan dengan Tujuan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah. Artinya kinerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat diketahui dari akuntabilitas, Kemampuan memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, efisiensi, efektivitas, dan pengendalian Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

I. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah diukur dengan indikator kemampuan unit organisasi dalam mempertanggungjawabkan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah serta penggunaan biaya pelaksanaanya.

Tabel 1. Pertanggungjawaban

No	Pertanggungjawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Akuntabel	21	52,5
2.	Cukup akuntabel	18	45,0
3.	Tidak akuntabel	1	2,5
	Jumlah	40	100

Tabel 1 menunjukkan Pertanggungjawaban Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah. Dari 40 orang responden 21 orang menyatakan akuntabel, 18 orang menyatakan cukup akuntabel, dan 1 orang menyatakan tidak akuntabel. Artinya terdapat kecenderungan bahwa pertanggungjawaban Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah akuntabel.

2. Kemampuan Memenuhi Kewajiban Keuangan

Kemampuan Memenuhi Kewajiban Keuangan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah diukur dengan indikator kemampuan dalam melunasi semua ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Tabel 2. Kemampuan Memenuhi Kewajiban Keuangan

No.	Kemampuan	Frekuensi	Persentase
1.	Mampu	23	57,5
2.	Cukup mampu	16	40,0
3.	Tidak mampu	1	2,5
	Jumlah	40	100

Tabel 2 menunjukkan kemampuan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melunasi semua ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dari 40 orang responden 23 orang menyatakan mampu, 16 orang menyatakan cukup mampu, dan 1 orang menyatakan tidak mampu. Artinya terdapat kecenderungan bahwa Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah mampu dalam melunasi semua ikatan keuangan jangka pendek dan jangka panjang.

3. Kejujuran

Kinerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah diukur dengan indikator Kejujuran, yaitu Urusan keuangan harus diserahkan kepada pegawai yang jujur dan kesempatan untuk berbuat curang dipersempit.

Tabel 3 Kejujuran

No.	Kejujuran	Frekuensi	Persentase
1.	Jujur	25	62,5
2.	Cukup jujur	14	35,0
3.	Tidak jujur	1	2,5
	Jumlah	40	100

Tabel 3 menunjukkan kejujuran Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah. Dari 40 orang responden 25 orang menyatakan jujur, 14 orang menyatakan cukup jujur, dan 1 orang menyatakan tidak jujur. Artinya terdapat kecenderungan bahwa Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah sudah jujur dalam menjalankan tugasnya mengelola pendapatan daerah dengan mengantisipasi kecurangan yang terjadi.

4. Efisiensi dan Efektifitas

Efisiensi dan efektifitas Kinerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah diukur dengan indikator kemampuan unit organisasi dalam Tata cara mengurus keuangan daerah harus menggunakan manajemen pengawasan yang baik, sehingga memungkinkan daerah dengan biaya seefisien mungkin dan memerlukan jangka waktu pelaksanaan seefektif mungkin.

Tabel 4 Efisiensi dan Efektifitas

No.	Efisiensi dan Efektifitas	Frekuensi	Persentase
1.	Efisien dan Efektif	23	57,5
2.	Cukup Efisien dan Efektif	16	40,0
3.	Tidak Efisien dan Efektif	1	2,5
	Jumlah	40	100

Tabel 4 menunjukkan Efisiensi dan efektifitas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah. Dari 40 orang responden 23 orang menyatakan efektif dan efisien, 16 orang menyatakan cukup efektif dan efisien, dan 1 orang menyatakan tidak efektif dan efisien. Artinya terdapat kecenderungan bahwa Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya.

5. Pengendalian

Pengendalian diukur dari indikator kemampuan Petugas keuangan daerah dan petugas pengawas dalam melakukan pengendalian pengelolaan pendapatan daerah.

Tabel 5 Pengendalian

No.	Pengendalian	Frekuensi	Persentase
1.	Terkendali	21	52,5
2.	Cukup	18	45,0
3.	Terkendali	1	2,5
	Tidak Terkendali		
	Jumlah	40	100

Tabel 5 menunjukkan Pengendalian Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah. Dari 40 orang responden 21 orang menyatakan terkendali, 18 orang menyatakan cukup terkendali, dan 1 orang menyatakan tidak terkendali. Artinya terdapat kecenderungan bahwa Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah sudah mampu mengendalikan pengelolaan keuangan daerah.

Dari hasil penelitian sebagaimana yang tersaji diatas maka terlihat bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu akuntabilitas, Kemampuan memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, efisiensi dan efektivitas, dan pengendalian semuanya mengarah pada kinerja yang Baik.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah aspek krusial yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya mekanisme yang jelas dan transparansi yang tinggi, diharapkan pengelolaan pendapatan daerah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kemampuan bidang pengelolaan pendapatan daerah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Dengan melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, serta meningkatkan kapasitas dan transparansi, diharapkan pendapatan daerah dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Kejujuran dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah adalah kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, dan pendidikan masyarakat, diharapkan pengelolaan pendapatan daerah dapat dilakukan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Efisiensi dan efektivitas dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengelola sumber daya secara optimal dan memastikan bahwa pendapatan digunakan untuk kepentingan masyarakat, pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Upaya untuk mengatasi tantangan yang ada, seperti korupsi dan kurangnya kompetensi, harus menjadi prioritas agar pengelolaan pendapatan daerah dapat berjalan dengan baik.

Pengendalian dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah adalah aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa pendapatan dikelola dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Dengan menerapkan mekanisme pengendalian yang efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Mengatasi tantangan yang ada akan menjadi kunci untuk

mencapai pengelolaan pendapatan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki akuntabilitas yang baik, mampu memenuhi kewajiban keuangan dengan baik, memiliki kejujuran yang baik, penerapan prinsip efisiensi dan efektifitas dengan baik, dan kegiatan pengendalian dilakukan dengan baik pula. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan semuanya mengarah pada kinerja yang Baik.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Daha, Khairid, 2002. *Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Hand out perkuliahan Matri kulasi, MAP UGM. Yogyakarta
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2003. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. PSKK UGM. Yogyakarta
- Halim, Abdul, 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Handyaningrat, 1996 *Pengantar Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE Yogyakarta
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI Yogyakarta
- Miles, Mattew B dan Huberman, Michael A. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta : University Indonesia- PRESS
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset

- Sedarmayanti, 2003. *Dasar-Dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran*. Mandar Maju, Bandung
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfa Beta. Bandung
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2024 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.